



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025
RISE TOGETHER

MANUAL IKU

 **BPPSDM**
KELAUTAN DAN PERIKANAN

 **BerAKHLAK**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Pengelolaan kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengelolaan kinerja diharapkan terciptanya budaya kerja yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengelolaan kinerja lebih lanjut dipetakan ke dalam sasaran kegiatan (SK) dan indikator kinerja utama (IKU) sebagai tolak ukur pencapaian keberhasilan kinerja.

Dalam rangka pengelolaan kinerja Politeknik KP Pangandaran, maka Politeknik KP Pangandaran menetapkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja Politeknik KP Pangandaran Tahun 2025 antara Direktur Politeknik KP Pangandaran dengan Kepala Pusat Pendidikan KP. Perjanjian kinerja tersebut merupakan acuan dalam pengukuran capaian kinerja Politeknik KP Pangandaran tahun 2025.

Sebagai instrumen dalam pengukuran kinerja tersebut, maka disusunlah Manual IKU (Indikator Kinerja Utama) yaitu dokumen penjelasan mengenai IKU yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan kegiatan dan perencanaan kinerja tahun 2026.

Pangandaran, 8 Desember 2025
Direktur Politeknik KP Pangandaran



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Arpan Nasri Siregar, A.Pi., M.S.T.Pi
NIP 196810301993031002

DAFTAR ISI

		Halaman
IKU 1.	Peserta Pendidikan Kelautan dan Perikanan Politeknik KP Pangandaran yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	 4
IKU 2.	Jumlah lulusan Politeknik KP Pangandaran (Orang)	 7
IKU 3.	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Pangandaran yang kompeten (Orang)	 9
IKU 4.	Nilai PNBP Politeknik KP Pangandaran (Rp. Miliar)	 11
IKU 5.	Kerja sama Politeknik KP Pangandaran yang disepakati (Kesepakatan)	 13
IKU 6.	Persentase lulusan Politeknik KP Pangandaran yang bersertifikasi kompetensi (%)	 15
IKU 7.	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Pangandaran (%)	 17
IKU 8.	Kelembagaan Publik Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi pada Politeknik KP Pangandaran (Lembaga)	 19
IKU 9.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Pangandaran (%)	 21
IKU 10.	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Pangandaran (Nilai)	 22
IKU 11.	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Pangandaran (Indeks)	 23
IKU 12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Pangandaran (%)	 26
IKU 13.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik KP Pangandaran (%)	 28
IKU 14.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Pangandaran (Nilai)	 30
IKU 15.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Pangandaran (Nilai)	 35
IKU 16.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Pangandaran (%)	 38

Peserta Pendidikan Kelautan dan Perikanan Politeknik KP Pangandaran yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)

Definisi

Dunia Usaha

adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar (UMKM dan UB);

Dunia Industri

adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produksi barang atau jasa secara massal menggunakan teknologi, mesin, dan tenaga kerja terorganisir;

Dunia Kerja

adalah aktivitas atau lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pekerjaan, atau profesi untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara individu maupun organisasi

Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Pangandaran yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja

adalah indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana lulusan Politeknik KP Pangandaran mampu mendapatkan pekerjaan, merintis/mengembangkan usaha dan atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, industri dunia kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dunia Usaha (SKDU) dari Kelurahan/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Nomor Induk Berusaha (NIB)/surat keterangan bekerja/kartu pegawai/Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/SK Kelompok/foto produk, media penjualan dan harga jual.

Formula Pengukuran

Akumulasi jumlah lulusan Politeknik KP Pangandaran pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan masa tunggu 9 (sembilan) bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja.

SATUAN

Orang

TINGKAT VALIDITAS



Outcome



Output Tingkat
Kendali Rendah



Output Tingkat
Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Pusat Administrasi Akademik dan Ketarunaan

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PERIODE PELAPORAN



Bulanan



Triwulanan



Semesteran



Tahunan

METODE CASCADING



Direct



Non Direct

DATA DUKUNG

Surat Penyampaian dari Direktur Politeknik KP Pangandaran kepada Kepala Pusat Pendidikan KP dengan melampirkan data by name by address lulusan Politeknik KP Pangandaran yang mengikuti pelatihan pra kerja, mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja

Matrik Peserta Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja

No	Nama	NIS/NIT	Prodi / Proka	Satuan Pendidikan	Serapan	Nama Tempat Kerja/Usaha/Produk	Bidang	Alamat	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

Jumlah Iulusan Politeknik KP Pangandaran (Orang)

Definisi

Lulusan Politeknik KP Pangandaran adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di Politeknik KP Pangandaran yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus/ijazah pada tahun berjalan.

Formula Pengukuran

Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan

SATUAN

Orang

TINGKAT VALIDITAS

Outcome ☒ Output Tingkat Kendali Rendah ☐ Output Tingkat Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Pusat Administrasi Akademik dan Ketarunaan

POLA PERHITUNGAN

Akumulasi ☐ Rata-rata ☐ Nilai Posisi Akhir ☒

POLARISASI

Maximize ☒ Minimize ☐ Stabilize ☐

PERIODE PELAPORAN

Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan ☐

METODE CASCADING

Direct ☒ Non Direct ☐

DATA DUKUNG

Nota Dinas Penyampaian dari Direktur Politeknik KP Pangandaran kepada Kepala Pusat Pendidikan KP dengan melampirkan data lulusan satuan pendidikan dan ijazah lulusan tahun berjalan.

Matrik lulusan satuan pendidikan KP

No	Satuan Pendidikan	Prodi / Proka	Nama Lulusan	NIT / NIS	Nomor Ijazah	Link Ijazah

IKU 3

Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)

Definisi

Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah SDM yang dididik pada Politeknik KP Pangandaran dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Kompetensi peserta didik adalah kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran.

Formula Pengukuran

Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang aktif maupun yang tunda

SATUAN

Orang

TINGKAT VALIDITAS

Outcome ☐ Output Tingkat Kendali Rendah ☒ Output Tingkat Kendali Tinggi ☐

SUMBER DATA

Pusat Administrasi Akademik dan Ketarunaan

POLA PERHITUNGAN

Akumulasi ☐ Rata-rata ☐ Nilai Posisi Akhir ☒

POLARISASI

Maximize ☒ Minimize ☐ Stabilize ☐

PERIODE PELAPORAN

Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan ☐

METODE CASCADING

Direct ☒ Non Direct ☐

DATA DUKUNG

Nota Dinas Penyampaian data peserta didik dari Direktur Polteknik KP Pangandaran kepada Kepala Pusat Pendidikan KP dengan melampirkan:

- Data Peserta didik by name by address aktif maupun tunda
- Data hasil peningkatan kompetensi peserta didik (KHS/Rapor) yang disahkan oleh Pimpinan Satuan Pendidikan baik yang aktif maupun tunda (SK Tunda)

Matrik Data Peserta Didik

No	Nama Lengkap	NIK Peserta Didik	NIT/NIS	Satuan Pendidikan	Prodi/Proka	Tingkat/ Kelas	Tahun Masuk	Jenis Kelamin	Alamat	Prov	Kab / Kota	Asal Usul (APU/Umum)	Status (Aktif/Tunda)	NIK Kepala Keluarga	Link (KHS/Rapor/SK Tunda)

IKU 4

Nilai PNBP satker Politeknik KP Pangandaran (Rp. Miliar)

Definisi

- Nilai PNBP merupakan gambaran satuan kerja yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.
- Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
- Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
 - b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
 - c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - d. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Formula Pengukuran

Akumulasi jumlah PNBP Sektor KP yang diperoleh baik dari sumber daya alam, pendapatan BLU maupun pendapatan dari sumber lainnya.

$$\text{Nilai PNBP Sektor KP} = \text{Nilai PNBP SDA} + \text{Nilai PNBP Lainnya} + \text{Nilai PNBP BLU}$$

SATUAN

Rupiah Miliar

TINGKAT VALIDITAS

☐ Outcome

☒ Output Tingkat
Kendali Rendah

☐ Output Tingkat
Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Subbagian Umum

POLA PERHITUNGAN

☐ Akumulasi

☐ Rata-rata

☒ Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

PERIODE PELAPORAN

☐ Bulanan

☐ Triwulanan

☐ Semesteran

☒ Tahunan

METODE CASCADING

☒ Direct

☐ Non Direct

DATA DUKUNG

Nota Dinas Penyampaian realisasi PNBP dan BLU dari Sekretariat BPPSDM

Kerja sama Politeknik KP Pangandaran yang disepakati (Kesepakatan)

Definisi

- Merupakan indikator yang menunjukkan usulan kerjasama baru di tahun berjalan, baik dari Politeknik KP Pangandaran, yang telah melalui proses telaah di internal Pusat Pendidikan KP dan Sekretariat BPPSDM yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan.
- Kerjasama yang disepakati berpedoman pada Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Formula Pengukuran

Jumlah usulan kerjasama baik Politeknik KP Pangandaran yang disepakati di tahun berjalan.

SATUAN

Dokumen kesepakatan

TINGKAT VALIDITAS

Outcome ☐ Output Tingkat Kendali Rendah ☒ Output Tingkat Kendali Tinggi ☐

SUMBER DATA

Pusat Administrasi Akademik dan Ketarunaan

POLA PERHITUNGAN

Akumulasi ☐ Rata-rata ☐ Nilai Posisi Akhir ☒

POLARISASI

Maximize ☒ Minimize ☐ Stabilize ☐

PERIODE PELAPORAN

Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan ☒

METODE CASCADING

Direct ☒ Non Direct ☐

DATA DUKUNG

Nota Dinas Penyampaian dari Direktur Politeknik KP Pangandaran kepada Kepala Pusat Pendidikan KP yang melampirkan Matrik Capaian Kerja Sama yang disepakati

Matrik Kerja Sama yang disepakati

No	Satuan Kerja	Mitra Kerjasama	Judul	Ruang Lingkup	Link Data Dukung
1					
2					
3					

Persentase Iulusan Politeknik KP Pangandaran yang besertifikasi kompetensi (%)

Definisi

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah peserta didik tingkat akhir yang telah tersertifikasi kompetensinya dalam rangka persiapan bekerja di bidang Kelautan dan perikanan

Formula Pengukuran

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

A = Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan

B = Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi

C = Persentase lulusan yang besertifikasi kompetensi

SATUAN

%

TINGKAT VALIDITAS

☐ Outcome

☒ Output Tingkat Kendali Rendah

☐ Output Tingkat Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Pusat Administrasi Akademik dan Ketarunaan

POLA PERHITUNGAN

☐ Akumulasi

☐ Rata-rata

☒ Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

PERIODE PELAPORAN

☐ Bulanan

☐ Triwulanan

☐ Semesteran

☒ Tahunan

METODE CASCADING

☒ Direct

☐ Non Direct

DATA DUKUNG

Nota Dinas Penyampaian dari Direktur Politeknik KP Pangandaran kepada Kepala Pusat Pendidikan KP dengan melampirkan Rekapitulasi Data lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi pendamping ijazah yang diperoleh selama pendidikan (tingkat 1,2,3) dibuktikan scan sertifikat kompetensi

Matrik lulusan satuan pendidikan yang besertifikasi kompetensi

No	Nama	NIS/NIT	Jenis Kelamin	Prodi / Proka	Satuan Pendidikan	Alamat	Kab/Kota	Prov	SERTIFIKAT YANG DIMILIKI	LINK SERTIFIKAT KOMPETENSI
1										
2										
3										

Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Pangandaran (%)

Definisi

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai peserta didik baru berdasarkan Surat Pengumuman Hasil Seleksi Akhir oleh Kepala Pusat Pendidikan KP. Jumlah peserta didik baru yang diterima tersebut berdasarkan jumlah kuota penerimaan peserta didik baru yang disahkan oleh Kepala Pusat Pendidikan KP

Formula Pengukuran

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

A = kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama
B = Jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru
C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%

SATUAN

%

TINGKAT VALIDITAS

☐ Outcome

☒ Output Tingkat Kendali Rendah

☐ Output Tingkat Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Pusat Administrasi Akademik dan Ketarunaan

POLA PERHITUNGAN

☐ Akumulasi

☐ Rata-rata

☒ Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

PERIODE PELAPORAN

☐ Bulanan

☐ Triwulanan

☐ Semesteran

☒ Tahunan

METODE CASCADING

☒ Direct

☐ Non Direct

DATA DUKUNG

Nota Dinas penyampaian dari Direktur Politeknik KP Pangandaran kepada Kepala Pusat Pendidikan KP berisi matrik Capaian Persentase Anak Pelaku Utama Yang Diterima Sebagai Peserta Didik Baru dengan melampirkan :

1. Pengumuman kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama disahkan oleh Kepala Pusat Pendidikan KP;
2. Pengumuman Hasil Seleksi Akhir Penerimaan Peserta Didik Baru oleh Kepala Pusat Pendidikan KP

Matrik Capaian Persentase Anak Pelaku Utama yang diterima sebagai Peserta Didik Baru (%)

No	Satuan Pendidikan	Kuota Penerimaan	Jumlah Peserta Didik Baru berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	Persentase (%)
1				
2				
3				
Total				

Kelembagaan Publik Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi pada Politeknik KP Pangandaran (Lembaga)

Definisi

- Lembaga pendidikan kelautan dan perikanan adalah seluruh sistem, struktur, dan unit pendidikan kelautan dan perikanan yang telah memperoleh pengakuan mutu melalui proses akreditasi oleh lembaga berwenang (BAN-PT, BAN-PDM). Lembaga dimaksud yaitu institusi dan program studi pada satuan pendidikan KP
- Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan institusi dan program studi pada satuan pendidikan
- Akreditasi institusi satuan pendidikan adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan.
- Akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi.
- Akreditasi pada Pendidikan KP merupakan dampak mutu pendidikan KP yang terstandar, sehingga nilai mutu lembaga pendidikan dapat menjadi cerminan diselenggarakannya budaya mutu pada satuan pendidikan KP dengan baik.
- Tahapan proses akreditasi meliputi:
 - a. evaluasi data dan informasi terkait mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau Program Studi;
 - b. penetapan peringkat Akreditasi berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - c. pemantauan pemenuhan syarat peringkat Akreditasi.

Formula Pengukuran

Satuan pendidikan telah memperoleh nilai asesmen mutu dan atau mendapatkan peringkat akreditasi dengan pengukuran melalui salah satu cara berikut:

- Perolehan nilai asesmen mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau program studi terhadap standar mutu Badan Akreditasi Nasional dan/atau
- Penetapan peringkat akreditasi program studi dan/atau institusi dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun berjalan

SATUAN

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

Lembaga

☐	Outcome	☒	Output Tingkat Kendali Rendah	☐	Output Tingkat Kendali Tinggi
Pusat Penjaminan Mutu					
☐	Akumulasi	☐	Rata-rata	☒	Nilai Posisi Akhir
☒	Maximize	☐	Minimize	☐	Stabilize
☐	Bulanan	☐	Triwulanan	☐	Semesteran
☒	Direct	☐	Non Direct	☐	☒ Tahunan

Nota Dinas Penyampaian dari Direktur Politeknik KP Pangandaran kepada Kepala Pusat Pendidikan KP yang melampirkan:

1. Sertifikat akreditasi institusi/program studi berdasarkan hasil penilaian BAN-PT dan BAN-PDM; dan/atau
2. Nilai Bulan mutu tahun penilaian tahun 2025

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Pangandaran (%)

Definisi

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Politeknik KP Pangandaran.

Formula Pengukuran

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen}} \times 100\%$$

SATUAN

%

TINGKAT VALIDITAS

Outcome ☐ Output Tingkat Kendali Rendah ☒ Output Tingkat Kendali Tinggi ☐

SUMBER DATA

Inspektorat Jenderal KP, Sekretariat BPPSDM KP

POLA PERHITUNGAN

Akumulasi ☐ Rata-rata ☐ Nilai Posisi Akhir ☒

POLARISASI

Maximize ☒ Minimize ☐ Stabilize ☐

PERIODE PELAPORAN

Bulanan ☐ Triwulanan ☒ Semesteran ☐ Tahunan ☐

METODE CASCADING

Direct ☐ Non Direct ☒

DATA DUKUNG

1. Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP : Hasil Pengawasan dari Itjen yang sudah di Tindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS).
2. Surat dari Sekretaris BPPSDM yang menindaklanjuti Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP

Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Pangandaran (Nilai)

Definisi

Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Penilaian Mandiri SAKIP Unit kerja merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP yang ada di Unit kerja

Formula Pengukuran

Penilaian Mandiri SAKIP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I. Kategori nilai Penilaian Mandiri SAKIP yaitu:

SATUAN

Nilai

TINGKAT VALIDITAS

Outcome ☐ Output Tingkat Kendali Rendah ☒ Output Tingkat Kendali Tinggi ☐

SUMBER DATA

Sekretariat BPPSDM KP

POLA PERHITUNGAN

Akumulasi ☐ Rata-rata ☐ Nilai Posisi Akhir ☒

POLARISASI

Maximize ☒ Minimize ☐ Stabilize ☐

PERIODE PELAPORAN

Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan ☒

METODE CASCADING

Direct ☐ Non Direct ☒

DATA DUKUNG

Surat Resmi Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat ke BPPSDM, Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker uji petik Itjen, Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim BPPSDM

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Pangandaran (Indeks)

Definisi

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Deputy Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023

Formula Pengukuran

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin.

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat ke dalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut :

Komponen	Jabatan		
	Struktural	Fungsional	Pelaksana
Diklat Kepemimpinan			
Pernah ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	15		
Tidak Pernah ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	0		
Diklat Fungsional			
Pernah ikut Diklat Fungsional		15	
Tidak Pernah ikut Diklat Fungsional		0	
Diklat Teknis 20 JP			
Terpenuhi 20 JP	15	15	22,5
Tidak Terpenuhi 20 JP	dihitung proporsional	dihitung proporsional	dihitung proporsional
Seminar			
Pernah ikut seminar	10	10	17,5
tidak pernah ikut seminar	0	0	0
Total nilai kompetensi	maksimal 40	maksimal 40	maksimal 40
$\text{penghitungan diklat teknis 20 JP} = \frac{n}{20 \text{ JP}} \times 15$			
n= jumlah JP diklat yang diikuti			

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

- Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
 - Kualifikasi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN.
 - Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN dengan ketentuan
 - Kinerja diolah datanya dari aplikasi e-kinerja BKN;
 - Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN
- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas (a) Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); (b) Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); (c) Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan (d) Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).
- Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IPL\text{ev } 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2}$$

$$IPL\text{ev } 1 = IPASN \text{ Pejabat Lev 1} + \text{Rerata Nilai IPL\text{ev } 2}$$

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Sumber Nilai IP ASN 2025
<http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024> dan nota dinas Biro SDM Aparatur dan Organisasi.

SATUAN

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

Nilai

 Outcome

 Output Tingkat
Kendali Rendah

 Output Tingkat
Kendali Tinggi

ropeg.kkp.go.id , Sekretariat BPPSDM KP

 Akumulasi

 Rata-rata

 Nilai Posisi Akhir

 Maximize

 Minimize

 Stabilize

 Bulanan

 Triwulanan

 Semesteran

 Tahunan

 Direct

 Non Direct

Surat dari Sekretariat BPPSDM KP terkait Hasil Pengukuran IP ASN Tahun 2025

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Pangandaran (%)

Definisi

- Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.
- Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formula Pengukuran

Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

SATUAN

%

TINGKAT VALIDITAS

 Outcome

 Output Tingkat
Kendali Rendah

 Output Tingkat
Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Sekretariat BPPSDM KP

POLA PERHITUNGAN

 Akumulasi

 Rata-rata

 Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

 Maximize

 Minimize

 Stabilize

PERIODE PELAPORAN

 Bulanan

 Triwulanan

 Semesteran

 Tahunan

METODE CASCADING

 Direct

 Non Direct

DATA DUKUNG

Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Pangandaran

IKU 13

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik KP Pangandaran (%)

Definisi

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Politeknik KP Pangandaran yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Formula Pengukuran

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Politeknik KP Pangandaran diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

Formula

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
 - a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%)
 - b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

SATUAN

%

TINGKAT VALIDITAS

☐ Outcome

☒ Output Tingkat
Kendali Rendah

☐ Output Tingkat
Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Sekretariat BPPSDM KP

POLA PERHITUNGAN

☐ Akumulasi

☐ Rata-rata

☒ Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

PERIODE PELAPORAN

☐ Bulanan

☐ Triwulanan

☐ Semesteran

☒ Tahunan

METODE CASCADING

☐ Direct

☒ Non Direct

DATA DUKUNG

Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDM KP

IKU 14

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Pangandaran

Definisi

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; (b) Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; (c) Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau (d) Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Formula Pengukuran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

- **Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%**

- Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
- Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

IKPA Rev =

2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

Belanja Pegawai : DevDIPA BPeg =

Belanja Barang : DevDIPA Bbar =

Belanja Modal :

Seluruh Jenis Belanja :

3. Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- Target Penyerapan masing-masing belanja

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	95%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA\ BK = (NK - Kw * 40\%) + (NK\ Dini * 30\%) + (NK\ BM * 30\%)$$

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
 - 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
 - Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik
- $$RKPT = \frac{(SPM\ LS\ TW)}{(SPM\ LS)} \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

%GUP disebulankan = % GUP x (jml hari sebulan)/Δt GUP

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran\ TUP}{TUP} \times 100$$

Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV, Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

$$\circ \text{ Rasio Dispensasi (permil) RDSPM} = \left(\frac{\text{Jumlah Dispensasi}}{\text{Jumlah TUP}} \right) \times 1000$$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK\ ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}}}{n} \right)$$

- Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

SATUAN

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

DATA DUKUNG

Nilai

 Outcome

 Output Tingkat
Kendali Rendah

 Output Tingkat
Kendali Tinggi

Subbagian Umum

 Akumulasi

 Rata-rata

 Nilai Posisi Akhir

 Maximize

 Minimize

 Stabilize

 Bulanan

 Triwulanan

 Semesteran

 Tahunan

Nota Dinas dari Biro Keuangan KKP

IKU 15

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Pangandaran

Definisi

- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk Menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.
- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemeneu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektifitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indicator dengan bobotpada masing-masing indikator.
- Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain :
 - Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
 - Baik, apabila NKPA > 80-90;
 - Cukup, apabila NKPA >60-80;
 - Kurang, apabila NKPA >50-60;
 - Sangat Kurang, apabila NKPA < 50.

Formula Pengukuran

NKA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut :

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	3. Nilai Efisiensi Satker	25

. Efektivitas

1. Capaian Indikator Kinerja Program

Keterangan :

CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

RIKSSi : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

TIKSSi : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2. Nilai Efektivitas Satker

Keterangan :

Nef Satker : Nilai Efektivitas Satker

RVROi : Realisasi Volume Roi

TVROi : Target Volume Rii

n : Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

NE Satker = (40% x Penggunaan SBK) + (60% x Efisiensi SBK)

$$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

$$NEf Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Formula Perhitungan NKPA Unit Eselon I adalah sebagai berikut :

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEF_{satker} \times WNEF_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan :

NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I

CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program

Nefsatker : Nilai Efektivitas Satker

Nesatker : Nilai Efisiensi Satker

WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program

WNEFsatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker

WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

SATUAN

Nilai

TINGKAT VALIDITAS

 Outcome

 Output Tingkat Kendali Rendah

 Output Tingkat Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Subbagian Umum

POLA PERHITUNGAN

 Akumulasi

 Rata-rata

 Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

 Maximize

 Minimize

 Stabilize

PERIODE PELAPORAN



Bulanan



Triwulanan



Semesteran



Tahunan

DATA DUKUNG

Nota Dinas dari Biro Keuangan KKP

Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Pangandaran (%)

Definisi

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran.

Formula Pengukuran

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan
B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan
C = Persentase capaian

SATUAN

%

TINGKAT VALIDITAS

 Outcome

 Output Tingkat Kendali Rendah

 Output Tingkat Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Subbagian Umum

POLA PERHITUNGAN

 Akumulasi

 Rata-rata

 Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

 Maximize

 Minimize

 Stabilize

PERIODE PELAPORAN

 Bulanan

 Triwulanan

 Semesteran

 Tahunan

METODE CASCADING

 Direct

 Non Direct

DATA DUKUNG

Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani Direktur Politeknik KP Pangandaran, diantaranya:

1. Laporan Rekapitulasi Cuti ASN
2. Laporan Kenaikan Gaji Berkala
3. Laporan Kenaikan Pangkat
4. Laporan Kenaikan Jabatan Fungsional
5. Laporan Mutasi pegawai
6. Laporan Pensiun Pegawai
7. Laporan Pengelolaan Sistem Manajemen Kepegawaian (e pegawai/SI ASN)
8. Laporan Pengembangan Program dan Kompetensi Pegawai
9. Laporan Presensi Pegawai
10. Laporan Humas dan Publikasi Sosial Media
11. Laporan Pengelolaan Persuratan
12. Laporan Pengelolaan Kearsipan
13. Laporan Kegiatan Bulanan
14. Laporan Kinerja Triwulanan
15. Laporan Tahunan
16. Laporan Layanan Perpustakaan
17. Laporan UKS / Layanan Kesehatan
18. Laporan Perlengkapan BMN dan Rumah Tangga
19. Laporan Penyelenggaraan Apel Pagi
20. Laporan Pelayanan Publik
21. Laporan Layanan Data dan Informasi
22. Laporan Layanan Umum dan Perkantoran

Matrik Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Pangandaran

No	Target Dokumen Tahun 2025	Target Dokumen Triwulan I	Target Dokumen Triwulan II	Target Dokumen Triwulan III	Target Dokumen Triwulan IV
	Target 64 Dokumen (100%)	Target 12 Dokumen (18,75%)	Target 26 Dokumen (40,625%)	Target 38 Dokumen (59,375%)	Target 64 Dokumen (100%)
1.	Laporan Rekapitulasi Cuti ASN (4 Dokumen)	Laporan Rekapitulasi Cuti ASN (1 Dokumen)	Laporan Rekapitulasi Cuti ASN (1 Dokumen)	Laporan Rekapitulasi Cuti ASN (1 Dokumen)	Laporan Rekapitulasi Cuti ASN (1 Dokumen)
2.	Laporan Kenaikan Gaji Berkala (1 Dokumen)	Laporan Kenaikan Pangkat (1 Dokumen)	Laporan Kenaikan Pangkat (1 Dokumen)	Laporan Kenaikan Pangkat (1 Dokumen)	Laporan Kenaikan Gaji Berkala (1 Dokumen)
3.	Laporan Kenaikan Pangkat (4 Dokumen)	Laporan Presensi Pegawai (3 Dokumen)	Laporan Presensi Pegawai (3 Dokumen)	Laporan Presensi Pegawai (3 Dokumen)	Laporan Kenaikan Pangkat (1 Dokumen)
4.	Laporan Kenaikan Jabatan Fungsional (1 Dokumen)	Laporan Pengelolaan Kearsipan (1 Dokumen)	Laporan Pengelolaan Kearsipan (1 Dokumen)	Laporan Pengelolaan Kearsipan (1 Dokumen)	Laporan Kenaikan Jabatan Fungsional (1 Dokumen)
5.	Laporan Mutasi pegawai (1 Dokumen)	Laporan Kegiatan Bulanan (3 Dokumen)	Laporan Kegiatan Bulanan (3 Dokumen)	Laporan Kegiatan Bulanan (3 Dokumen)	Laporan Mutasi pegawai (1 Dokumen)
6.	Laporan Pensiun Pegawai (1 Dokumen)	Laporan Kinerja Triwulanan (1 Dokumen)	Laporan Kinerja Triwulanan (1 Dokumen)	Laporan Kinerja Triwulanan (1 Dokumen)	Laporan Pensiun Pegawai (1 Dokumen)
7.	Laporan Pengelolaan Sistem Manajemen Kepegawaian (e pegawai/SI ASN) (1 Dokumen)	Laporan Penyelenggaraan Apel Pagi (1 Dokumen)	Laporan Layanan Perpustakaan (1 Dokumen)	Laporan Penyelenggaraan Apel Pagi (1 Dokumen)	Laporan Pengelolaan Sistem Manajemen Kepegawaian (e pegawai/SI ASN) (1 Dokumen)
8.	Laporan Pengembangan Program dan Kompetensi Pegawai (1 Dokumen)	Laporan Pelayanan Publik (1 Dokumen)	Laporan Penyelenggaraan Apel Pagi (1 Dokumen)	Laporan Pelayanan Publik (1 Dokumen)	Laporan Pengembangan Program dan Kompetensi Pegawai (1 Dokumen)
9.	Laporan Presensi Pegawai (12 Dokumen)		Laporan Pelayanan Publik (1 Dokumen)		Laporan Presensi Pegawai (3 Dokumen)
10.	Laporan Humas dan Publikasi Sosial Media (1 Dokumen)		Laporan Layanan Umum dan Perkantoran (1 Dokumen)		Laporan Humas dan Publikasi Sosial Media (1 Dokumen)
11.	Laporan Pengelolaan Persuratan (1 Dokumen)				Laporan Pengelolaan Persuratan (1 Dokumen)

Matrik Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Pangandaran

No	Target Dokumen Tahun 2025	Target Dokumen Triwulan I	Target Dokumen Triwulan II	Target Dokumen Triwulan III	Target Dokumen Triwulan IV
	Target 64 Dokumen (100%)	Target 12 Dokumen (18,75%)	Target 26 Dokumen (40,625%)	Target 38 Dokumen (59,375%)	Target 64 Dokumen (100%)
12.	Laporan Pengelolaan Kearsipan (4 Dokumen)				Laporan Pengelolaan Kearsipan (1 Dokumen)
13.	Laporan Kegiatan Bulanan (12 Dokumen)				Laporan Kegiatan Bulanan (3 Dokumen)
14.	Laporan Kinerja Triwulanan (4 Dokumen)				Laporan Kinerja Triwulanan (1 Dokumen)
15.	Laporan Tahunan (1 Dokumen)				Laporan Tahunan (1 Dokumen)
16.	Laporan Layanan Perpustakaan (2 Dokumen)				Laporan Layanan Perpustakaan (1 Dokumen)
17.	Laporan UKS / Layanan Kesehatan (1 Dokumen)				Laporan UKS / Layanan Kesehatan (1 Dokumen)
18.	Laporan Perlengkapan BMN dan Rumah Tangga (1 Dokumen)				Laporan Perlengkapan BMN dan Rumah Tangga (1 Dokumen)
19.	Laporan Penyelenggaraan Apel Pagi (4 Dokumen)				Laporan Penyelenggaraan Apel Pagi (1 Dokumen)
20.	Laporan Pelayanan Publik (4 Dokumen)				Laporan Pelayanan Publik (1 Dokumen)
21.	Laporan Layanan Data dan Informasi (1 Dokumen)				Laporan Layanan Data dan Informasi (1 Dokumen)
22.	Laporan Layanan Umum dan Perkantoran (2 Dokumen)				Laporan Layanan Umum dan Perkantoran (1 Dokumen)



Terima Kasih.

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia